

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services : an Integrated Approach*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *FAQ: Apakah yang dimaksud dengan belanja tidak terduga?* <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-tidak-terduga>
- Hayes, R., Wallage, P., & Gortemaker, H. (2014). *Principal of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (pp. 1–8).
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (pp. 1–4).
- Lusiana dkk. (2016). *Audit Sektor Publik Terapan*.
- M. Agung Alfarizi. (2020). *Evaluasi Kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Covid-19*. 1–15.
- Mahsun, M. (2017). *Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik. Modul 1*, 2–17.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)*.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya*.
- Murwanto, R., Budiarmo, A., & Ramadhana, F. H. (2015). *Audit Sektor Publik. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Ri, 1*, 488.

- Pengadaan.com. (2017). *Sekilas Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.  
<https://tender.pengadaan.com/index.php/news/view/14557/Sekilas-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa>
- Pradana, M. (2018). Alokasi Belanja Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Develop*, 2(1).  
<https://doi.org/10.25139/dev.v2i1.960>
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)* (Issue 022698, pp. 22698–22701).
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, Studi Kasus*. Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2008a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* (p. 282).
- Republik Indonesia. (2008b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (pp. 1–128).
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (p. 184).
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020*. In *Sekretariat Negara* (Vol. 2019, Issue 023780).
- Walikota Mojokerto. (2016). *Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto* (pp. 1–14).
- Walikota Mojokerto. (2020). *Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga*.